

## **Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024**

**Elsi Safitri<sup>1</sup>, Taufik Akhyar<sup>2</sup>, Reni Apriani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [elsisafitri2602@gmail.com](mailto:elsisafitri2602@gmail.com)

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 29 Agustus 2025

### **ABSTRACT**

*Elections in Indonesia serve as a key instrument to realize people's sovereignty and establish a representative government, yet political patronage continues to dominate local democratic processes. This study aims to analyze the forms, strategies, and impacts of political patronage employed by legislative candidates in Electoral District 5, Ogan Komering Ilir Regency, during the 2024 General Election. This research uses a qualitative approach with a descriptive case study design, where data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal five forms of patronage used by candidates, namely vote buying, individual goods distribution, collective goods provision, social services, and pork barrel projects, which effectively enhance electoral success by mobilizing public support. However, these practices also strengthen patron-client relationships, potentially undermining the quality of local democracy and shifting political orientation toward transactional politics, highlighting the need for stricter regulations and stronger electoral oversight to improve democratic governance*

**Keywords:** Political Patronage, 2024 Election, Local Democracy, Transactional Politics

### **ABSTRAK**

*Pemilu di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang representatif, namun praktik patronase politik masih mendominasi proses demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, strategi, dan dampak patronase politik oleh calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk patronase yang digunakan kandidat, yaitu pembelian suara, pemberian pribadi, pemberian barang kelompok, penyediaan pelayanan sosial, dan proyek gentong babi, yang terbukti efektif meningkatkan peluang kemenangan melalui mobilisasi dukungan masyarakat. Meskipun demikian, praktik ini berdampak pada menguatnya pola hubungan patron-klien yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mendorong orientasi politik ke arah transaksi material, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan pemilu yang lebih ketat untuk memperkuat tata kelola demokrasi.*

**Kata Kunci:** Patronase Politik, Pemilu 2024, Demokrasi Lokal, Politik Transaksional

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi memposisikan pemilihan umum (pemilu) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi mekanisme formal untuk memastikan hak masyarakat dalam memilih dan dipilih, sekaligus membentuk pemerintahan yang representatif (Rosyan & Prasojo, 2024). Dalam perspektif global, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas (Diamond, 2019). Organisasi internasional seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2023) menegaskan bahwa pemilu yang inklusif dan kompetitif menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Namun, praktik politik di tingkat lokal kerap menunjukkan adanya kompleksitas, termasuk maraknya patronase politik sebagai strategi pemenangan kandidat legislatif.

Sejak era reformasi, sistem pemilu di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan signifikan, termasuk peralihan dari sistem perwakilan berimbang menjadi sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partai politik (Ansor et al., 2023). Mekanisme one man one vote mendorong kandidat legislatif untuk membangun komunikasi langsung dengan konstituen, sekaligus meningkatkan tingkat kompetisi antarcalon. Studi oleh Schedler (2022) menyoroti bahwa sistem pemilu terbuka cenderung melahirkan persaingan berbasis personalisasi kandidat dibandingkan ideologi partai, sehingga strategi politik berbasis patronase menjadi semakin dominan dalam memobilisasi dukungan suara.

Dalam konteks politik elektoral, patronase dipahami sebagai pertukaran sumber daya material maupun jasa antara kandidat dan pemilih untuk memperoleh dukungan politik. Fenomena ini terjadi secara luas di berbagai negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, di mana orientasi politik masyarakat kerap dipengaruhi oleh insentif jangka pendek dibandingkan evaluasi terhadap program kerja kandidat (Aspinall & Sukmajati, 2015). Penelitian Keefer & Khemani (2021) menunjukkan bahwa praktik patronase di negara berkembang memperkuat ketergantungan pemilih terhadap kandidat dan melemahkan rasionalitas politik masyarakat. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya asimetri kekuasaan, di mana politisi sebagai patron memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya dibandingkan masyarakat sebagai klien.

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya pada Daerah Pemilihan (Dapil) 5, praktik patronase terlihat nyata melalui pemberian uang tunai, bantuan sembako, fasilitas kesehatan gratis, dan proyek pembangunan infrastruktur desa. Temuan awal menunjukkan bahwa kandidat dengan perolehan suara signifikan cenderung menggunakan strategi patronase sebagai instrumen utama kampanye. Misalnya, M. Reki, salah satu kandidat dengan perolehan suara tertinggi, melakukan program perbaikan jalan penghubung desa dan pemasangan lampu jalan, yang terbukti efektif meningkatkan simpati masyarakat dan mendongkrak popularitasnya.



*Gambar 1 Dokumentasi M. Reki saat meninjau perbaikan jalan penghubung desa Bina Tani, kecamatan Mesuji raya*

Perkembangan teknologi digital memperkuat praktik patronase melalui penyebaran informasi secara cepat di media sosial. Kandidat memanfaatkan platform seperti Facebook dan Instagram untuk menampilkan citra peduli dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Studi oleh Tufekci (2019) menunjukkan bahwa media sosial memperkuat persepsi publik terhadap kandidat melalui narasi visual yang emosional. Dalam kasus Dapil 5, dokumentasi M. Reki saat meninjau pembangunan infrastruktur desa dan publikasi kegiatan reses Dani Sukisno diunggah ke media sosial sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pemilih.



*Gambar 2 Reses dan Menerima Aspirasi Masyarakat Mengenai Infrastruktur*

Meskipun patronase meningkatkan efektivitas mobilisasi dukungan, praktik ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Orientasi politik berbasis material membuat masyarakat cenderung mengabaikan visi, misi, dan program kerja kandidat, sehingga menurunkan kualitas deliberasi publik (Berenschot & Aspinall, 2019). Penelitian Stokes et al. (2023) juga menegaskan bahwa praktik patronase berpotensi melemahkan akuntabilitas pejabat publik pasca-terpilih, karena relasi patron-klien memosisikan kandidat sebagai pemberi keuntungan dan pemilih sebagai penerima pasif. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi penguatan tata kelola demokrasi berbasis partisipasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, strategi, dan dampak praktik patronase politik yang digunakan oleh calon anggota legislatif di Dapil 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi literatur tentang patronase politik, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola demokrasi lokal dan mengurangi praktik politik transaksional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik patronase politik pada Pemilu Legislatif 2024 di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik melalui analisis kontekstual berdasarkan perspektif para informan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang melibatkan berbagai informan seperti calon anggota legislatif, kepala desa, tokoh masyarakat, tim sukses, dan warga setempat. Data primer dikumpulkan langsung dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti laporan resmi, berita daring, artikel jurnal, dan dokumen pemilu. Proses analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan sesuai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), dengan memastikan validitas data melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai bentuk, strategi, dan dampak praktik patronase politik terhadap dinamika demokrasi lokal, sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus utama pembahasan adalah strategi yang digunakan oleh para calon legislatif (caleg) dalam menerapkan patronase serta dampak patronase politik yang dilakukan oleh para calon legislatif. Analisis ini menggunakan kerangka teori patronase yang dikemukakan oleh Edward Aspinall, yang mencakup lima bentuk patronase, yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian individu (*individual goods*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*), pelayanan aktifitas (*service and activated*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel project*).

## *Patronase Politik Oleh Calon Anggota Legislatif*

Patronase merupakan materi atau keuntungan lainnya yang didistribusikan oleh politisi (patron) kepada pemilih atau pendukung (klien). Seperti pemberian uang, sembako, janji-janji dan keuntungan ekonomi lainnya. Dimana pemberian yang dilakukan oleh politisi tersebut ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat, dan sebagai bentuk timbal balik masyarakat membalas pemberian tersebut dengan menawarkan dukungan umum atau pelayanan pribadi sesuai dengan keinginan politisi.

Bentuk-bentuk konkret praktik patronase politik yang dijalankan oleh delapan calon anggota legislatif. Praktik ini diwujudkan melalui lima bentuk patronase, yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian individu (*individual goods*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*), pelayanan aktifitas (*service and activated*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel project*).

Melalui kelima bentuk patronase tersebut, dapat terlihat adanya hubungan timbal balik yang bersifat saling membutuhkan antara para caleg dan para pemilih, termasuk elemen-elemen masyarakat lainnya. Dimana bentuk-bentuk disalurkan melalui caleg secara langsung maupun tim suksesnya. Para caleg memberikan berbagai hadiah, dan bantuan kepada pemilih.

### **1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik patronase politik dalam pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya di Daerah Pemilihan 5, merupakan strategi yang digunakan oleh calon legislatif untuk memperoleh dukungan suara. Patronase politik tersebut tampak melalui adanya relasi timbal balik antara kandidat dengan masyarakat atau tokoh masyarakat setempat. Para kandidat memanfaatkan hubungan personal maupun struktural yang sudah terjalin lama dengan aktor-aktor lokal seperti kepala desa, tokoh adat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat basis dukungan politik mereka.

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa praktik patronase politik dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian bantuan sosial, sumbangan kegiatan keagamaan dan adat, hingga pemberian fasilitas tertentu kepada individu atau kelompok masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya proses tukar-menukar keuntungan antara kandidat dan masyarakat, di mana masyarakat memberikan dukungan suara sebagai balas jasa atas bantuan yang diterima. Praktik seperti ini dinilai masih kuat mengakar dalam kultur politik lokal dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar selama proses pemilu.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik patronase politik tidak hanya dilakukan menjelang masa kampanye formal, tetapi telah dibangun jauh hari sebelum masa pemilu melalui pendekatan-pendekatan informal dan kedekatan emosional. Kandidat secara intensif menjalin hubungan dengan masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, menghadiri kegiatan sosial-keagamaan, serta menunjukkan kepedulian mereka terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Strategi ini efektif dalam menumbuhkan loyalitas dan komitmen dukungan masyarakat terhadap kandidat.

Di sisi lain, praktik patronase politik di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten OKI juga memiliki dampak terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Meskipun patronase dapat mempermudah kandidat memperoleh suara, praktik ini berpotensi memunculkan relasi kekuasaan yang timpang dan menghambat pembangunan politik yang berorientasi pada kepentingan publik secara luas. Hal ini terjadi karena orientasi politik masyarakat lebih menekankan pada keuntungan jangka pendek daripada penilaian rasional atas visi, misi, dan program kerja kandidat.

Pembahasan hasil penelitian ini mengonfirmasi teori patronase politik yang menyatakan bahwa hubungan antara pemberi patron (patron) dan penerima patron (klien) merupakan relasi yang saling menguntungkan. Kandidat sebagai patron memberikan sumber daya tertentu, sedangkan masyarakat sebagai klien memberikan dukungan politik yang dibutuhkan kandidat. Dalam konteks pemilu legislatif di Kabupaten OKI, praktik patronase politik menjadi strategi dominan yang dilakukan oleh hampir seluruh kandidat karena dinilai efektif untuk mendapatkan suara di tengah kompetisi politik yang ketat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik patronase politik dalam pemilu legislatif tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-budaya masyarakat setempat, di mana relasi personal, ikatan kekeluargaan, dan pertimbangan material menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan bagi demokrasi elektoral Indonesia karena masih menempatkan orientasi politik pada dimensi transaksional dibandingkan orientasi pada gagasan, kebijakan, dan program kerja yang substantif.

## 2. Pemberian-Pemberian Pribadi (*Individual Goods*)

Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya memperoleh dukungan suara pada pemilihan legislatif, para calon anggota legislatif menggunakan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih sebagai strategi politik. Pemberian tersebut umumnya dilakukan baik saat kunjungan ke rumah warga maupun ketika kampanye, dan berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial antara kandidat dan masyarakat. Bentuk pemberian yang dilakukan oleh para calon legislatif meliputi sembako, pakaian, alat rumah tangga, hingga bantuan keuangan untuk keperluan pribadi pemilih.

Bantuan sembako menjadi salah satu bentuk pemberian yang paling dominan. Sembako yang dibagikan bervariasi, antara lain beras, gula, teh, kopi, mie instan, minyak goreng, gandum, dan tepung. Selain itu, terdapat pula kandidat yang memberikan pakaian seperti baju dengan mencantumkan nama, nomor urut, dan asal partai mereka sebagai bentuk sosialisasi dan promosi politik. Bantuan-bantuan ini umumnya disalurkan langsung oleh calon legislatif maupun melalui tim sukses mereka menjelang masa pemilihan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pemberian sembako atau barang lainnya tidak selalu merata kepada seluruh masyarakat. Terdapat kelompok warga yang menerima bantuan, namun sebagian lainnya tidak mendapatkan apa pun. Ketidakmerataan distribusi bantuan ini menunjukkan

adanya seleksi tertentu oleh kandidat atau tim sukses mereka dalam menentukan siapa saja yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan dukungan suara.

Selain pemberian sembako dan pakaian, beberapa calon legislatif juga memberikan bantuan dalam bentuk lain, seperti memperbaiki infrastruktur desa, misalnya perbaikan jalan. Bantuan perbaikan jalan biasanya dilakukan dengan melibatkan tim sukses serta masyarakat setempat melalui kegiatan gotong royong. Bentuk bantuan semacam ini selain untuk mendukung kebutuhan masyarakat juga bertujuan menumbuhkan simpati dan loyalitas pemilih kepada kandidat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik politik transaksional oleh para calon legislatif di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak hanya berbentuk uang tunai, melainkan juga berupa barang kebutuhan pokok, bantuan pribadi, maupun dukungan terhadap pembangunan fasilitas umum. Strategi pemberian material tersebut mencerminkan adanya pola hubungan patron-klien, di mana pemilih memberikan dukungan politik sebagai balasan atas bantuan yang mereka terima. Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi pilihan politik masyarakat masih didominasi oleh kepentingan material jangka pendek dibandingkan dengan pertimbangan rasional terkait visi, misi, dan program kerja kandidat, sehingga menjadi tantangan bagi penguatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

### 3. Pelayanan Dan Aktivitas (Services and Activities)

Penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2024 tidak hanya berbentuk pemberian material seperti uang dan sembako, tetapi juga melibatkan penyediaan layanan sosial dan penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sosialisasi di bidang kesehatan, layanan kesehatan gratis, serta pelaksanaan turnamen olahraga dan kesenian sebagai bentuk pendekatan non-material kepada pemilih.

Dalam praktiknya, beberapa calon legislatif menyelenggarakan sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan dengan tujuan membantu masyarakat memahami prosedur pembuatan dan manfaat kepesertaan BPJS, serta memberikan kemudahan bagi warga yang mengalami kendala administratif. Selain itu, terdapat pula kegiatan layanan kesehatan gratis berupa pengobatan massal yang diadakan di desa-desa sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang kerap menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Di samping kegiatan kesehatan, para calon legislatif juga mengadakan turnamen olahraga, khususnya voli, yang diselenggarakan atas nama partai maupun atas nama pribadi calon legislatif. Turnamen-turnamen tersebut diberi nama khusus, seperti AHY CUP dan AGUS CIK CUP, dan dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan hari jadi partai atau momentum kampanye. Pelaksanaan turnamen olahraga ini berfungsi tidak hanya sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat popularitas dan membangun kedekatan emosional antara kandidat dengan pemilih.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk patronase politik yang dilakukan para calon legislatif bersifat beragam dan dirancang untuk menumbuhkan citra kepedulian kandidat terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Strategi pelayanan dan aktivitas sosial semacam ini di satu sisi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan kesehatan, membuka ruang aspirasi warga, serta menyediakan sarana olahraga dan rekreasi. Namun di sisi lain, strategi ini juga memperlihatkan upaya kandidat dalam membangun loyalitas dan dukungan pemilih melalui pendekatan patron-klien yang menempatkan kandidat sebagai pihak pemberi manfaat dan masyarakat sebagai penerima yang diharapkan memberikan timbal balik berupa suara dukungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik patronase politik dalam pemilu legislatif tidak terbatas pada transaksi material, melainkan juga diwarnai oleh pemberian layanan sosial dan penyelenggaraan aktivitas publik sebagai strategi politik yang efektif untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi patronase dalam politik lokal diwarnai oleh kompleksitas strategi, di mana kandidat memadukan bantuan material dan pendekatan pelayanan sosial untuk memperkuat pengaruh politik mereka di tengah masyarakat.

#### 4. Barang-Barang Kelompok (club goods)

Penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase politik dalam bentuk barang kelompok atau *club goods* menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2024. Barang kelompok atau *club goods* merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada kelompok atau komunitas tertentu, bukan kepada individu, dengan tujuan membangun citra positif kandidat sekaligus memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, para calon legislatif memberikan bantuan berupa material pembangunan kepada fasilitas keagamaan seperti masjid dan mushola. Bantuan yang diberikan meliputi semen, pasir, paving block, alat pengeras suara, hingga pendingin ruangan (AC). Selain bantuan material keagamaan, terdapat juga bentuk dukungan lain seperti pembangunan mushola baru, perbaikan jalan lingkungan desa, serta pemasangan pagar sekolah. Bantuan-bantuan ini umumnya disalurkan melalui pengajuan dari tim sukses atau atas inisiatif langsung kandidat, baik dilakukan menjelang masa kampanye maupun sebelum masa kampanye dimulai.

Pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat ini menunjukkan adanya relasi patronase politik yang terjalin melalui pemenuhan kebutuhan bersama. Masyarakat membutuhkan fasilitas keagamaan dan infrastruktur umum yang layak guna mendukung aktivitas sosial dan ibadah mereka, sementara calon legislatif memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi ini dinilai efektif karena memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh komunitas, sehingga menumbuhkan simpati dan loyalitas masyarakat kepada kandidat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun bantuan material tersebut disampaikan tanpa kontrak politik secara eksplisit, terdapat harapan implisit dari kandidat bahwa masyarakat akan memberikan dukungan suara sebagai bentuk balas jasa atas bantuan yang telah diterima. Dengan demikian, praktik pemberian barang kelompok dalam bentuk pembangunan fasilitas keagamaan dan perbaikan infrastruktur publik bukan hanya mencerminkan kepedulian sosial kandidat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik untuk membangun dan mempertahankan basis dukungan di masyarakat.

Fenomena ini menegaskan bahwa praktik patronase politik di tingkat lokal tidak hanya dilakukan melalui pemberian uang tunai atau sembako kepada individu, melainkan juga melalui dukungan terhadap fasilitas publik yang bersifat kolektif. Strategi ini memperlihatkan adanya pertukaran kepentingan antara calon legislatif sebagai patron yang menyediakan bantuan dan masyarakat sebagai klien yang memberikan dukungan politik, sehingga memperkuat pola hubungan patron-klien dalam

##### 5. Proyek-Proyek Gentong Babi (Pork Barrel Projects)

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *pork barrel politics* atau yang dikenal dengan istilah proyek gentong babi juga dilakukan oleh calon legislatif, khususnya caleg petahana, dalam Pemilu Legislatif 2024. Proyek gentong babi merujuk pada proyek pembangunan yang dibiayai oleh anggaran publik namun diarahkan untuk kepentingan konstituen politik tertentu, dengan tujuan memperoleh dukungan elektoral pada pemilu selanjutnya.

Dalam praktiknya, proyek gentong babi ini dilakukan melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung. Di antara proyek yang terealisasi, terdapat perbaikan jalan di sejumlah titik desa, pembangunan dan renovasi mushola, pemasangan pagar sekolah, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga pengerasan jalan dan pembuatan siring. Proyek-proyek ini dilakukan baik dengan menggunakan dana pribadi calon legislatif maupun melalui pemanfaatan dana aspirasi dari masa jabatan sebelumnya.

Selain proyek-proyek yang telah terealisasi, terdapat pula sejumlah janji politik terkait pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan exit tol Mesuji Raya. Meskipun pembangunan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui anggaran APBN, komitmen tersebut tetap disampaikan oleh calon legislatif sebagai bentuk janji politik kepada masyarakat dengan harapan akan meningkatkan elektabilitas mereka di daerah pemilihan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa selain pembangunan fisik, kegiatan reses dimanfaatkan oleh caleg petahana untuk mendekatkan diri dengan konstituen. Kegiatan reses yang seharusnya difokuskan untuk menampung aspirasi masyarakat dimanfaatkan pula sebagai ajang bersosialisasi dan memperkenalkan pencalonan kembali, serta menjadi ruang bagi caleg untuk menegaskan komitmen mereka dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, caleg tidak hanya

mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menyampaikan janji politik dan meminta dukungan untuk periode berikutnya.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa proyek gentong babi menjadi salah satu strategi penting dalam patronase politik di daerah penelitian. Strategi ini menunjukkan adanya pola hubungan timbal balik antara caleg dan masyarakat, di mana proyek pembangunan infrastruktur dijadikan alat untuk membangun citra kepedulian kandidat sekaligus memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam dinamika politik lokal, distribusi pembangunan bukan hanya dilihat sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik, melainkan juga sebagai instrumen politik yang dimanfaatkan untuk memperkuat basis dukungan dan mempertahankan kekuasaan politik caleg, khususnya caleg petahana.

### ***Dampak Patronase Politik***

Penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase politik yang dilakukan oleh para calon legislatif dalam Pemilu Legislatif 2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap proses dan hasil pemilihan. Dampak tersebut terlihat dalam dua aspek utama, yaitu munculnya politik balas budi dan kontribusi terhadap kemenangan para calon legislatif.

#### **1. Politik Balas Budi**

Praktik patronase politik menciptakan relasi timbal balik antara caleg dan pemilih dalam bentuk politik balas budi. Strategi pemberian bantuan yang dilakukan oleh para calon legislatif, baik berupa uang, sembako, bantuan fasilitas ibadah, maupun infrastruktur, memunculkan kewajiban moral bagi sebagian pemilih untuk memberikan dukungan elektoral mereka sebagai balasan atas bantuan tersebut. Relasi patron-klien ini diperkuat dengan adanya pendekatan langsung yang dilakukan caleg kepada pemilih dan tokoh-tokoh kunci di masyarakat seperti tokoh agama, kepala desa, ketua RT, serta pemimpin organisasi kepemudaan.

Bantuan yang diberikan dianggap sebagai bentuk kepedulian dan perhatian caleg terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan perasaan berutang budi, terutama bagi pemilih yang secara ekonomi kurang mampu. Namun demikian, terdapat juga sebagian masyarakat yang menganggap pemberian tersebut sebagai kewajiban caleg tanpa merasa terikat secara moral untuk memberikan suara. Artinya, meskipun politik balas budi menjadi pola umum yang muncul, penerimanya tetap bergantung pada kondisi sosial dan pandangan individu masing-masing pemilih.

#### **2. Kemenangan Para Calon Legislatif**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik patronase politik berkontribusi signifikan terhadap kemenangan para caleg pada Pemilu Legislatif 2024. Data perolehan suara di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan tingginya suara yang dikumpulkan oleh caleg-caleg yang secara aktif melakukan praktik patronase.

Strategi patronase politik seperti pemberian uang tunai, sembako, kegiatan sosial, bantuan ke fasilitas umum, hingga penyelenggaraan turnamen olahraga terbukti efektif dalam meningkatkan simpati dan loyalitas pemilih. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas jaringan dukungan, terutama di kalangan pemilih muda yang banyak terlibat dalam kegiatan olahraga dan komunitas lokal.

Selain itu, caleg petahana memiliki keuntungan tambahan karena telah memiliki basis pemilih dan tim sukses yang terorganisir dengan baik. Pemeliharaan jaringan tim sukses secara terus-menerus oleh caleg petahana memperkuat keberhasilan strategi patronase yang dijalankan. Hal ini membuat praktik patronase menjadi instrumen politik yang tidak hanya bersifat jangka pendek untuk mendulang suara, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam mempertahankan kekuasaan dan kedudukan politik.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik patronase politik memberikan dampak signifikan dalam dua dimensi utama. Pertama, menciptakan hubungan balas budi antara caleg dan pemilih melalui pemberian bantuan material maupun non-material. Kedua, praktik patronase terbukti meningkatkan peluang kemenangan para calon legislatif melalui penguatan jaringan dukungan elektoral, terutama bagi caleg petahana yang telah memiliki basis massa loyal. Strategi patronase politik ini menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi dinamika politik elektoral di daerah penelitian dan memperkuat pola hubungan patron-klien dalam kontestasi politik lokal.

## SIMPULAN

Kesimpulan, penelitian mengenai patronase politik pada Pemilu Legislatif 2024 di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa praktik patronase masih menjadi strategi dominan dalam upaya memenangkan kontestasi politik. Bentuk patronase yang dilakukan oleh para caleg meliputi pemberian pribadi seperti uang dan sembako, pelayanan sosial seperti pengobatan gratis dan sosialisasi BPJS, barang kelompok seperti bantuan pembangunan mushola dan masjid, hingga proyek gentong babi berupa pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. Praktik-praktik tersebut menimbulkan dua dampak utama. Pertama, munculnya politik balas budi, di mana sebagian masyarakat merasa berkewajiban memberikan dukungan politik sebagai imbalan atas bantuan yang diterima, terutama bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Kedua, praktik patronase terbukti berdampak signifikan terhadap kemenangan calon legislatif, ditunjukkan oleh tingginya perolehan suara caleg yang aktif melakukan patronase dibandingkan dengan caleg lainnya. Selain itu, patronase politik memperkuat pola hubungan patron-klien dalam konteks politik lokal, di mana masyarakat menukar hak suara mereka dengan bantuan yang bersifat material maupun non-material dari caleg.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Ansor, M., Anggreni, L., Lubis, A., & Frensh, W. (2023). *Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup*. CV. Eureka Media Aksara.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. PolGov.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Mesuji dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Mesuji Makmur dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Mesuji Raya dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071802793>
- Diamond, L. (2019). *Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency*. Penguin Press.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2023). *The global state of democracy 2023: Rebuilding social contracts*. IDEA. <https://www.idea.int/gsod>
- Keefer, P., & Khemani, S. (2021). When do politicians reward loyalty? Patronage networks, population movements, and public goods provision. *American Economic Journal: Applied Economics*, 13(3), 1-35. <https://doi.org/10.1257/app.20200302>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis*. Rajawali Pers.
- Mahsun, M. (2020). Demokrasi patronase dan praktik politik uang: Pengalaman pemilu legislatif 2014 di Kota Pelembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.1996>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi kuasa dan suara: Politik patron-klien pada Pilkada langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167-184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Pedoman Penulisan Skripsi dalam Karya Ilmiah. (2020). Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Pratama, R. A., Alvina, & Tandi, R. (2023). Politik patronase pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(2), 129-139. <https://doi.org/10.52423/japmas.v1i2.17>
- Ramli, M. (2016). Patronase politik dalam demokrasi lokal: Analisis terhadap terpilihnya Hj. Marniwati pada pemilukades di Desa Jojolo Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].

Roiyan, A. (2023). Perspektif patronase Edward Aspinall dalam proses pemenangan Busyro Karim sebagai bupati dua periode di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 318–340.

Rosyan, A. N., & Prasojo, E. (2024). Pemilihan umum dan budaya patronase: Mahalnya biaya politik di tengah berkembangnya sistem meritokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Aceh*, 12(1), 47–63. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/11791>

Schedler, A. (2022). *The politics of uncertainty: Sustaining and subverting electoral authoritarianism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197581553>

Setiawan, I., Ibrahim, & Ranto. (2022). Patronase dan klientalisme politik (Studi pada masyarakat daerah pemilihan I, Kabupaten Bangka di pemilihan legislatif 2019). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1255–1262.

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2023). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108987810>

Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Sufianto, D., Subagyo, A., & Kurnia, D. (2018). Pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan Kota Cimahi. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(01), 1–21. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.49>

Tufekci, Z. (2019). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Walidin, Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.

Yanto, A. (2022). Fenomena dan indikasi patronase dan klientelisme pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, 2(1), 1–20.